

### **BAB III**

## **ANALISIS KONDISI INVESTASI DAN PELUANG/TANTANGAN FDI DI INDONESIA**

Pada bab ketiga ini akan diuraikan mengenai analisis kondisi internal dan eksternal investasi di Indonesia yang dilakukan melalui analisis SWOT. Hasil analisis kondisi investasi di Indonesia ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi diplomasi Indonesia dalam menarik investasi langsung luar negeri (FDI) Negara-negara kawasan Arab. Analisis kondisi investasi ini tidak lain merupakan tahap identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan investasi di Indonesia serta peluang dan ancaman terhadap masa depan investasi Indonesia. Dengan kata lain, melalui analisis SWOT ini akan dapat diketahui daya tarik investasi langsung luar negeri bagi investor khususnya yang berasal dari negara kawasan Teluk, yang dikenal dengan negara Petrodollar.

#### **A. Analisis Kondisi Internal Investasi di Indonesia**

##### **1. Kekuatan Investasi di Indonesia**

Analisis kondisi internal ini meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia di bidang investasi sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan pembangunan nasional. Ketika hampir dua dasawarsa setelah Indonesia merdeka, pada 1957 dan 1959 terjadi proses nasionalisasi dari perusahaan Belanda dan perusahaan Inggris. Sebuah proses yang tidak saja menggeser kepemilikan, tetapi juga mengubah manajemen secara keseluruhan. Hal itu menyebabkan hengkangnya para

eksekutif dan karyawan dari luar negeri. Akibatnya, kita menghadapi kendala keterbatasan SDM hampir di semua lini manajemen dan tenaga terampil. Bukan hanya stagnasi yang terjadi, tapi juga kerusakan dan pembusukan perusahaan. Tentu saja kebijakan yang diambil ini ikut andil menyeret kondisi ekonomi Indonesia memasuki masa buram, tingginya inflasi, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pada 1966 terjadi pergantian pemimpin bangsa. Kondisi krisis yang semakin mendera rakyat disikapi pemerintah dengan mengeluarkan "kebijakan rehabilitasi dan penyelamatan," dan sekaligus mengubah cara pandang terhadap penanam modal asing (PMA). Demikian juga pandangan terhadap institusi keuangan multilateral seperti bank dunia. Kebijakan ini berlangsung dari 1966 sampai 1970. UU Penanaman Modal diberlakukan pada 1967. Pada saat yang sama aset perusahaan swasta asing yang dinasionalisasi dikembalikan. Mulai saat itu investasi asing mengalir ke Indonesia, khususnya di sektor barang konsumsi.<sup>32</sup>

Kemudian 1970-1997 perekonomian Indonesia dikaruniai laju pertumbuhan yang relatif tinggi cepat. Kebutuhan akan investasi asing semakin dirasakan di tengah keterbatasan peran negara dalam pembangunan. Sampai dengan 1997 daya tarik investasi di Indonesia masih memikat. Terbukti pada tahun itu Indonesia menduduki urutan ketiga di bawah China dan AS sebagai negara tujuan investasi. Sedangkan pada 2000, 2001, dan 2002, investasi mengalami penurunan, sehingga kita

---

<sup>32</sup> <http://www.fe.unibraw.ac.id/?id=72>, diakses 10 November 2009

berada pada urutan keempat. Kondisi itu terus menurun hingga ke urutan ketujuh, delapan, dan sembilan pada 2004, 2005, dan 2006. Akhirnya posisi kita berada di bawah India, Vietnam, dan Thailand. (Jetro, 2007).

Investasi sendiri dalam menopang perekonomian dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada 2003 sumbangan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,6 %, lalu meningkat 14,7 persen (2004), pada 2005 menyumbang 10,8 persen, dan pada 2006 turun tajam hanya 2,9 persen (BPS, 2007). Kalau dilihat dari angka nilai penurunan investasi di Indonesia 2005, nilai investasi asing USD 8.914,6 juta, sedangkan dalam negeri Rp 30.665 miliar. Nilai tersebut turun pada 2006 untuk investasi asing USD 4.699,9 juta dan penanam modal dalam negeri hanya Ro 16.912,3 miliar.<sup>33</sup>

Sejak terjadinya peralihan rezim kekuasaan khususnya di masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan sangat menarik bagi akses investasi asing. Ketersediaan insentif fiskal untuk menarik investor asing, tidak ada batasan nilai investasi, kemungkinan investor asing untuk memiliki seluruhnya investasi mereka dalam hampir semua sektor dan proses persetujuan investasi yang telah disederhanakan merupakan sebagian dari keuntungan bagi investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia terletak di persimpangan dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, dan Samudera

<sup>33</sup> <http://www.fe.unibraw.ac.id/?id=72>, diakses 10 November 2009

Hindia dan Samudera Pasifik, menawarkan beberapa keunggulan komparatif kepada investor dengan rentang dan perpaduan yang menarik seperti.<sup>34</sup>

- a. Negara yang luas dan subur yang dilimpahi dengan sumber daya alam yang kaya dan terdiversifikasi, antara lain, pertanian, perkebunan, perikanan, tambang, minyak dan gas.
- b. Jumlah penduduk yang besar, yaitu kurang lebih 210 juta penduduk, yang sangat dinamis dalam menyesuaikan diri terhadap kemajuan, suatu pasar yang berpotensi sangat besar serta angkatan kerja yang kompetitif.
- c. Lokasi yang strategis mengendalikan jalur komunikasi laut internasional yang sangat penting.
- d. Negara yang semakin demokratis.

Ekonomi terbuka yang berorientasi pasar, dengan rezim pertukaran mata uang asing yang bebas. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa investasi merupakan salah satu faktor paling penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan, dengan demikian, berupaya keras untuk memperbaiki prosedur investasi di masa mendatang agar dapat merangsang iklim investasi yang lebih menguntungkan.

---

<sup>34</sup>[http://www.hsbc.co.id/1/2/hsbc-premier\\_in\\_ID/bantuan-di-seluruh-dunia/perbankan-dan-investasi-di-indonesia](http://www.hsbc.co.id/1/2/hsbc-premier_in_ID/bantuan-di-seluruh-dunia/perbankan-dan-investasi-di-indonesia), diakses 10 November 2009

Membbaiknya persepsi investor asing terhadap investasi di Indonesia menjadi angin segar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga konsultan asing maupun survey Bank Dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2008, Indonesia masuk dalam 25 negara yang paling menarik sebagai tujuan investasi asing langsung (FDI) dan tingkat daya saingnya terus meningkat seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1. di bawah ini:

**Tabel 3.1. Indexis Top 25 Most Attractive FDI Destinations**

No.	Negara	No.	Negara
1	China	14	Kanada
2	India	15	Jepang
3	Amerika Serikat	16	Malaysia
4	Inggris	17	Negara Teluk Lainnya
5	Hongkong	18	Afrika Selatan
6	Brazil	19	Meksiko
7	Singapura	20	Turki
8	Uni Emirat Arab	21	Indonesia
9	Rusia	22	Polandia
10	Jerman	23	Asia Tengah
11	Australia	24	Korea Selatan
12	Vietnam	25	Republik Czech
13	Prancis		

Sumber: PKPM RI

Peringkat itu berdasarkan perusahaan konsultan dunia, AT Kearney, yang melakukan survei terhadap CEO dan COO dari 1.000 perusahaan kelas dunia di 65 negara. Daya saing melakukan bisnis di Indonesia, berdasarkan Bank Dunia, juga meningkat dari peringkat 135 pada 2007 menjadi peringkat 123 pada 2008 dari 178 negara yang disurvei. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap menjadi negara tujuan

investasi FDI, meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama infrastruktur.<sup>35</sup>

Daya tarik lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia adalah hasil sumber daya alam Indonesia yang besar. Pada 2007 Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dengan produksi mencapai sekitar 17 juta ton/tahun, mengalahkan Malaysia. Sementara untuk produksi kakao Indonesia pada 2007 mencapai 700 ribu ton dan sebagai produsen kakao kedua terbesar di dunia. Sumber daya alam lainnya adalah timah dengan produksi 65 ribu ton pada 2007, Indonesia menjadi negara produsen ke-2 terbesar di dunia. Demikian pula dengan emas yang produksinya mencapai 89 ribu ton. Produksi tembaga dan nikel yang menduduki peringkat produksi terbesar ke-4 dan ke-5 di dunia.<sup>36</sup>

International Institute for Management Development (IMD) menilai Indonesia masih mempunyai daya tarik investasi di tengah perekonomian dunia yang memburuk. Kriteria yang digunakan IMD adalah pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal I yang masih positif atau mencapai 4,3%. Artinya dari penjelasan soal efektifitas maupun investasi atau daya tarik dari sisi ekonomi, suatu ekonomi yang bisa mencapai

---

<sup>35</sup><http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=153721>, diakses 10 November 2009.

<sup>36</sup> <http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=153721>, diakses 10 November 2009.

pertumbuhan positif pada saat seluruh dunia mengalami kontraksi ekonomi, yang menandakan bahwa Indonesia memiliki fundamental domestik cukup kuat. Alasan eksplisit tersebut juga didukung oleh populasi dan geografi Indonesia yang besar. Hal itu membuat potensi daya tarik investasi di Indonesia ada. IMD menempatkan Indonesia sangat berbeda dibandingkan negara lain terutama di Asia yang biasanya karakternya berorientasi ekspor. Sementara, Indonesia masih didukung oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah.

International Institute for Management Development merilis *World Competitiveness Yearbook 2009*, menunjukkan kemajuan yang signifikan dari daya saing Indonesia di tingkat global dari peringkat 51 menjadi 42 dari seluruh 57 negara utama dunia yang dinilai. Indonesia berada dalam kelompok negara emerging lainnya seperti Brazil dan lebih baik dari Filipina, Mexico, Afrika Selatan dan Rusia. Namun, daya saing Indonesia masih berada di bawah India, Thailand, China, dan Malaysia. Bagi Indonesia, peningkatan tahun 2009 disebabkan perbaikan signifikan dalam kinerja ekonomi yang menduduki ranking 41 tahun 2009. Efisiensi pemerintah meningkat menjadi 31 tahun 2009, dan efisiensi bisnis naik menjadi 38. Namun, Indonesia masih perlu memperbaiki infrastruktur yang turun dari 51 tahun 2008 menjadi 53 tahun 2009.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <http://suaramerdeka.com/Daya.Tarik.Investasi.Indonesia.Tinggi>, diakses 10 November 2009

## 2. Kelemahan dan Masalah Investasi di Indonesia

Setelah krisis 1998 jumlah proyek baru PMA, paling tidak berdasarkan data persetujuan dari BKPM, sempat mengalami peningkatan. Namun setelah tahun 2000, jumlahnya menurun dan cenderung akan berkurang terus. Satu hal yang menarik dari data BKPM tersebut adalah bahwa sejak krisis, jumlah proyek baru PMA rata-rata per tahunnya lebih besar daripada jumlah proyek baru PMDN. (penanaman modal dalam negeri). Ini menandakan bahwa bagi perkembangan investasi langsung/jangka panjang di dalam negeri, khususnya dalam periode pasca krisis, peran PMA jauh lebih penting daripada PMDN. Namun demikian, dilihat dari nilai netonya (arus investasi masuk – arus keluar), gambarannya setelah krisis lebih memprihatinkan; walaupun pada tahun 2002 dan 2004 sempat kembali positif (Tabel 3.2).<sup>38</sup>

Lebih banyaknya arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Terutama perusahaan-perusahaan asing di industri-industri yang sifat produksinya *footloose* seperti elektronik, tekstil dan pakaian jadi, sepatu, dan lainnya, yakni yang tidak terlalu tergantung pada sumber daya alam atau bahan baku lokal di Indonesia akan dengan mudahnya pindah ke negara-negara tetangga jika melakukan produksi di dalam negeri sudah tidak lagi menguntungkan.

---

<sup>38</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

Tabel 3.2.  
 Nilai Neto Arus PMA ke Indonesia, 1990-2004 (juta dollar AS)

Tahun	Nilai
1990	1.093
1991	1.482
1992	1.777
1993	2.004
1994	2.109
1995	4.346
1996	6.194
1997	4.667
1998	- 356
1999	-2.745
2000	-4.550
2001	-2.978
2002	145
2003	-597
2004	423

Catatan: arus masuk PMA termasuk privatisasi BUMN kepada pihak asing, dan restrukturisasi perbankan, terutama penjualan asset-aset bank ke investor asing.

Sumber: Bank Indonesia: *Indonesian Financial Statistics*, beberapa terbitan berturut-turut sampai Februari 2005

Buruknya daya saing Indonesia dalam menarik PMA lebih nyata lagi jika dibandingkan dengan perkembangan PMA di negara-negara lain. Misalnya dalam kelompok ASEAN, Indonesia satu-satu negara yang mengalami arus PMA negatif sejak krisis ekonomi 1998; walaupun nilai negatifnya cenderung mengecil sejak tahun 2000. Hal ini ada kaitannya dengan iklim politik yang semakin baik dibandingkan pada periode 1998-1999, yang memperkecil keraguan calon-calon investor untuk menanam modal mereka di Indonesia.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Lebih konkritnya

lagi, iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi, dan bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin, di sisi lain (Stern, 2002). Sebagai contoh, beberapa studi menunjukkan bahwa di China dan India, sebagai hasil dari perbaikan-perbaikan iklim investasi pada dekade 80-an dan 90-an yang menurunkan biaya dan risiko investasi sangat drastis, maka investasi swasta sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) meningkat hampir 200 persen.<sup>39</sup>

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. Masalah Freeport dan lamanya pemerintah mengambil keputusan dalam kasus Exxon di Cepu baru-baru ini juga sangat mempengaruhi iklim berinvestasi jangka panjang di Indonesia.

---

<sup>39</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

Di dalam suatu laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2005a), diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting. Walaupun sedikit berbeda dalam peringkat kendala investasi antar negara, hasil survei Bank Dunia tersebut didukung oleh hasil survei tahunan mengenai daya saing negara yang dilakukan oleh *The World Economic Forum* (WEF) yang hasilnya ditunjukkan di dalam laporan tahunannya, *The Global Competitiveness Report*. Berdasarkan persentase dari responden, ternyata tiga faktor penghambat bisnis yang mendapatkan peringkat paling atas adalah berturut-turut birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan.<sup>40</sup>

Hasil survei dari JETRO mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis atau investasi di sejumlah negara di Asia menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda. Faktor penghambat terbesar bagi Indonesia adalah upah buruh yang makin mahal, disusul dengan sistem perpajakan yang sulit dan rumit. Di Malaysia dan Singapura, upah yang mahal juga merupakan permasalahan paling besar yang dihadapi pengusaha. Di Thailand, faktor terbesar adalah prosedur perdagangan yang rumit, sedangkan di Filipina, Vietnam, dan India, faktor terbesar adalah kondisi infrastruktur yang buruk.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

<sup>41</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

Masalah perburuan, mulai dari tingkat upah yang terus meningkat akibat penerapan kebijakan upah minimum, kualitas sumber daya manusia yang rendah, termasuk rendahnya penguasaan atas teknologi, hingga hubungan industrial memang belakangan ini semakin memperburuk keunggulan komparatif Indonesia dalam tenaga kerja. Survei yang dilakukan IPEM di tahun 2005 menunjukkan bahwa biaya untuk mengatasi masalah tenaga kerja mencapai 5% dari biaya produksi tahunan. Dari sekitar 600 responden, 12,6% menyatakan mengalami perselisihan dalam penentuan upah, 5,8% mengalami masalah dengan jaminan sosial tenaga kerja, dan 8,4% mengalami masalah dengan serikat buruh (ISEI, 2006).<sup>42</sup>

Hubungan industrial merupakan salah satu titik rawan dalam daya saing perekonomian Indonesia. Walaupun secara kuantitas jumlah pemogokan di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang drastis sejak reformasi dimulai tahun 1998 lalu tetapi risiko ketidakpastian yang ditimbulkan oleh hubungan industrial yang *adversial* merupakan faktor penting yang membuat daya tarik Indonesia untuk investasi menjadi rendah dibandingkan Cina dan Vietnam. Sering terjadinya pemogokan akan membuat kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan, dan hal ini jelas akan menghilangkan niat calon investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Masalah serius lainnya adalah peningkatan biaya melakukan bisnis yang timbul karena ekses pelaksanaan otonomi daerah. Keterbatasan

---

<sup>42</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

anggaran dan lemahnya prioritas kebijakan menyebabkan timbulnya tekanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa memperhitungkan daya dukung perekonomian lokal dan nasional. Pengenaan pungutan atas lalu lintas barang dan penumpang antar propinsi atau antar kabupaten hanya merupakan satu contoh. Peningkatan hambatan birokrasi perijinan dan beban retribusi baru yang diundangkan berbagai pemerintah daerah dengan alasan untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) menimbulkan peningkatan biaya bisnis, yang berarti juga memperbesar risiko kerugian bagi investasi, dan merupakan lahan subur bagi praktek-praktek korupsi. Hasil survei LPEM di tahun 2005 menunjukkan penurunan biaya informal yang harus dibayarkan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi kepada aparat pemerintah daerah dari sekitar 10,8% di tahun 2001 menjadi 6,4% di tahun 2005. Walaupun demikian, untuk pemain yang baru masuk *entry cost* tetap tinggi yaitu sekitar 9% dari nilai modal awal. Biaya-biaya ini sebagian besar digunakan untuk mendapatkan ijin lokasi dan AMDAL.<sup>43</sup>

Mahalnya memulai bisnis memang merupakan salah satu penyebab memburuknya iklim investasi di Indonesia. Suatu laporan dari Bank Dunia di tahun 2005 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara paling mahal, baik dalam arti biaya maupun jumlah hari dalam melakukan bisnis. Seperti yang ditunjukkan di Tabel 3.3, untuk mengurus semua perizinan usaha, seorang pengusaha memerlukan sekitar 151 hari, dan besarnya

<sup>43</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009



biaya dan modal minimum yang diperlukan berkisar sekitar, masing-masing 130,7% dan 125,6% dari pendapatan per kapita di Indonesia.<sup>44</sup>

Sejumlah masalah yang telah disebut di atas mencerminkan kualitas dari kelembagaan publik di Indonesia. Buruknya kelembagaan publik di Indonesia juga ditunjukkan di dalam laporan tahunan dari WEF. Dapat dilihat bahwa untuk hampir semua indikator tersebut, kondisi Indonesia semakin buruk. Misalnya, dalam hal kemandirian judicial dari pengaruh politik dari anggota-anggota pemerintah (misalnya menteri dan presiden), politikus, masyarakat, dan perusahaan, peringkat Indonesia jatuh dari 58 ke 68; walaupun secara relatif kejatuhannya lebih kecil karena jumlah sampel negara bertambah. Dalam hal kerangka kerja *legal* bagi pelaku usaha untuk menangani perselisihan-perselisihan bisnis dan menolak legalitas dari tindakan-tindakan atau peraturan-peraturan pemerintah, posisi Indonesia menurun dari 51 ke 73. Untuk dua indikator berikut yang merupakan salah satu penentu krusial bagi pertumbuhan investasi, Indonesia juga masih buruk kinerjanya, yakni hak-hak properti dan perlindungan kekayaan intelektual.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

<sup>45</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

**Tabel 3.3. Posisi Indonesia untuk Beberapa Indikator mengenai Kelembagaan Publik dalam**

<i>The Global Competitiveness Report</i> 2004-2005 dan 2005-2006 Indikator	Peringkat	
	2004-2005 (104 negara)	2005-2006 (117 negara)
Kemandirian Judisial	58	68
Efisiensi dari kerangka kerja legal	51	73
Hak Properti	67	88
Perlindungan kekayaan intelektual	47	68
Pemborosan dalam pengeluaran pemerintah	25	40
Beban dari regulasi pemerintah pusat	15	45
Tingkat birokrasi		
Tingkat dan efek dari perpajakan	85	48
Pembayaran tidak regular/ilegal dalam ekspor dan impor	27	24
Pembayaran tidak reguker.ilegal dalam pemakaian utilitas publik	75	106
Pembayaran tidak regular/ilegal dalam pembayaran pajak	70	94
Pembayaran tidak regular.ilegal dalam kontrak publik	76	104
Pembayaran tidak regular/ilegal dalam keputusan judisial	46	84

Sumber: WEF (2004, 2005)

Perihal pemborosan atau efisiensi dalam pengeluaran pemerintah, yakni apakah pemerintah menyediakan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan pokok bagi dunia usaha yang tidak disediakan oleh pasar, termasuk infrastruktur dasar, posisi Indonesia juga memburuk. Dalam hal beban yang harus ditanggung oleh pelaku bisnis dari regulasi-regulasi pemerintah pusat, yakni dalam memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi berkaitan dengan perizinan, pelaporan, dsb.nya, sebelumnya Indonesia berada pada posisi yang relatif baik dari 104 negara menjadi lebih buruk. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa distorsi pasar domestik semakin besar dalam satu tahun terakhir ini akibat regulasi-regulasi

pemerintah pusat. Untuk tingkat birokrasi, peringkat Indonesia sangat rendah, yang memberi kesan bahwa tingkat efisiensi dari birokrasi di Indonesia sangat rendah dan ini merupakan salah satu sumber penting dari iklim bisnis yang distortif in Indonesia. Faktor lainnya yang juga sangat berpengaruh dalam arti bisa merupakan insentif atau disinsentif bagi keinginan untuk melakukan bisnis atau investasi adalah pajak, dan untuk ini Indonesia relatif baik dan dalam satu tahun terakhir sedikit membaik, yang artinya secara relatif dibandingkan banyak negara lain di dalam sampel, pajak di Indonesia bukan merupakan sumber distortif yang besar terhadap iklim bisnis.

Dalam hal pembayaran ekstra tidak tercatat atau terdokumentasi atau penyuaipan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekspor dan impor, dan pemakaian utilitas publik, peringkat Indonesia juga sangat rendah, dan hal ini bisa merupakan salah satu masalah yang harus dihilangkan untuk mencapai efektivitas dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah selama ini yang bertujuan memulihkan kegiatan usaha dan meningkatkan investasi di Indonesia. Mungkin untuk negara-negara yang sudah lama melakukan investasi di Indonesia jadi sudah sangat kenal keadaan di Indonesia atau untuk preusan-perusahaan multinacional dengan kekayaan perusahaan yang sangat besar kondisi seperti ini tidak menjadi masalah serius sampai menghambat investasi mereka di dalam negeri. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan skala menengah dan dari negara-negara baru, kondisi seperti ini bisa menakutkan atau membuat pemilik

modal menjadi ragu akan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan jika berinvestasi di Indonesia.

Hal yang lebih menarik adalah jika posisi Indonesia dalam kelembagaan publik dibandingkan dengan posisi dari negara-negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia relatif buruk di dalam kelompok ASEAN, walaupun bukan yang terburuk. Hal ini menandakan bahwa kelembagaan publik di Indonesia secara relatif dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya tidak kondusif bagi kegiatan bisnis/investasi. Faktor lainnya yang juga sangat bertanggung jawab terhadap memburuknya kondisi investasi di Indonesia adalah kondisi infrastruktur, tidak hanya dalam kuantitas yang terbatas dibandingkan volume mobilisasi manusia dan barang, tetapi juga dalam kualitas yang buruk dari infrastruktur yang sudah ada, khususnya jalan raya. Kombinasi dari kedua aspek ini tentu sangat menghambat kelancaran produksi dan perdagangan di dalam negeri maupun kegiatan ekspor, yang selanjutnya berarti beban biaya bagi perusahaan-perusahaan. Suatu laporan dari Bank Dunia (World Bank, 2005b) menunjukkan buruknya kinerja infrastruktur di Indonesia, bahkan sangat buruk di dalam kelompok ASEAN. Untuk jaringan telepon tetap, posisi Indonesia berada pada peringkat terbawah diantara 12 negara ASEAN. Juga untuk kelistrikan, kondisi Indonesia nomor 2 dari bawah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dari sisi infrastruktur, Indonesia merupakan negara ASEAN yang sangat tidak menarik bagi investasi.

Laporan dari WEF (2004, 2005) juga menunjukkan hal yang sama, untuk kualitas infrastruktur secara keseluruhan periode 2004-2005, Indonesia berada pada peringkat ke 44 dari 104 negara yang masuk di dalam sampel, dan posisinya bertambah buruk untuk periode 2005-2006 yang menurun ke 66 dari 117 negara. Untuk kualitas infrastruktur menurut jenisnya, kondisi Indonesia juga buruk, bahkan sangat buruk untuk misalnya kualitas telepon/fax dan jumlah jaringan telepon per 1000 penduduk.<sup>46</sup>

## **B. Analisis Kondisi Eksternal Investasi di Indonesia**

### **1. Peluang Investasi yang Menarik Bagi Investor Timur Tengah**

Potensi Indonesia bagi investasi sangat besar, baik dilihat dari sisi penawaran (produksi) maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran, harus dibedakan antara potensi jangka pendek dan potensi jangka panjang. Potensi jangka pendek yang masih dapat diandalkan oleh Indonesia tentu adalah masih tersedianya banyak sumber daya alam (SDA), termasuk komoditas-komoditas pertambangan dan pertanian, dan jumlah tenaga kerja yang besar. Sedangkan potensi jangka panjang adalah pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mampu mengembangkan teknologi dan meningkatkan kualitas SDM-nya; namun ini sangat

---

<sup>46</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

tergantung pada kemauan sungguh-sungguh dari negara tersebut.<sup>47</sup>

Jika potensi jangka panjang ini tidak dapat direalisasikan, dan berbagai permasalahan seperti yang telah disebut di atas juga tidak tuntas, maka lambat laun potensi jangka pendek akan hilang. Misalnya, salah satu permasalahan tenaga kerja di Indonesia adalah kualitas serta etos kerja yang rendah. Selama ini, keunggulan klasik dari tenaga kerja Indonesia relatif dibandingkan banyak negara lain adalah upah murah, namun saat ini dan terutama di masa depan, keunggulan ini (potensi jangka pendek) tidak bisa lagi diandalkan sepenuhnya. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, persaingan yang semakin ketat akibat munculnya banyak pemain-pemain baru di pasar dan produksi global yang sangat agresif dan semakin ketatnya penerapan segala macam standarisasi produk yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan konsumen, maka Indonesia masih bisa mengandalkan upah buruh murah hanya apabila dikombinasikan dengan kualitas tenaga kerja yang tinggi. Karena upah murah akan tidak berarti apa-apa, jika produktivitasnya rendah dan produk yang dihasilkan berkualitas buruk. Dari sisi permintaan, ada dua faktor utama yakni jumlah penduduk (dan strukturnya menurut umur) dan pendapatan riil per kapita. Kedua faktor ini secara bersama menentukan besarnya potensi pasar, yang berarti juga besarnya potensi keuntungan bagi seorang investor. Dari segi jumlah penduduk, tentu Indonesia, seperti halnya China dan India, merupakan potensi pasar yang sangat besar. Namun jumlah penduduk saja

---

<sup>47</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

tidak cukup jika pendapatan penduduk rata-rata per orang atau kemampuan belanja konsumen di Indonesia kecil. Oleh karena itu, kemampuan Indonesia untuk pulih kembali setelah krisis dengan menghasilkan pertumbuhan PDB riil rata-rata per kapita yang tinggi yang paling tidak seperti pada masa Orde Baru menjadi salah satu pertimbangan serius bagi calon investor asing.<sup>48</sup>

Saat ini Indonesia masih dalam proses pemulihan, yang ditandai dengan semakin tingginya pertumbuhan PDB yang kembali positif sejak 1999 walaupun dengan laju yang relatif lambat. Dengan pendapatan yang cenderung meningkat, yang berarti potensi pasar di dalam negeri cenderung meningkat, maka dari sisi permintaan potensi Indonesia untuk investasi sangat baik. Namun, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk negara-negara yang juga mengalami krisis yang sama, Indonesia masih buruk. Berdasarkan *database* dari Asian Development Bank, Thailand yang mengalami krisis ekonomi sama parahnya seperti yang dialami Indonesia ternyata mampu menggenjot pertumbuhan sebesar 4,4% tahun 1999. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun yang sama hanya 0,9% (menurut BPS 0,8%). Yang paling menarik dari laporan ADB ini adalah bahwa ternyata Vietnam merupakan negara yang paling baik pertumbuhannya di kawasan tersebut. Pada tahun 1999 negara itu mengalami pertumbuhan sekitar 4,7%, lebih tinggi daripada laju pertumbuhan rata-rata dari semua negara di Asia

---

<sup>48</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

Tenggara yakni sebesar 3,8%; dan tahun 2002 diperkirakan tumbuh 7,1%. Dua tahun berikutnya ekonomi Vietnam tumbuh masing-masing 7,3% dan 7,7%. Filipina juga terkena krisis dan tahun 2001 ekonominya tumbuh hanya 1,8%; namun tiga tahun berikutnya laju pertumbuhan ekonominya menanjak terus hingga mencapai sekitar 6,1% pada tahun 2004. Demikian juga Malaysia, yang ekonominya pada tahun 2001 tumbuh hanya 0,3%, namun pada tahun 2004 mencapai 7,1%.<sup>49</sup>

Daerah tujuan investasi yang diincar para pemodal tidak lagi negara yang memiliki potensi ekonomi, melainkan tawaran keuntungan yang besar. Karena itu, gelombang investasi pengusaha asal Timur Tengah, bergerak mengikuti hukum tersebut. Ketika pasar finansial di Amerika Serikat dan Eropa melemah, para pengusaha Arab mulai memikirkan untuk berinvestasi di kawasan sendiri, misalnya di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Doha, Qatar. Sentimen buruk itu semakin suram akibat pengawasan ketat yang diberlakukan oleh otoritas dan pelaku pasar keuangan Amerika dan Eropa terhadap kemungkinan investasi yang terkait dengan aksi terorisme. Jumlah investasi yang ditarik dari Barat itu disebutkan mencapai US\$ 1,4 triliun. Dana sebesar itu masih tersimpan di negara investor dan siap dialirkan ke lahan investasi baru yang menjanjikan dan lebih nyaman.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

<sup>50</sup> [http://www.gatra.com/2007-12-24/versi\\_cetak.php?id=110555](http://www.gatra.com/2007-12-24/versi_cetak.php?id=110555), diakses 21 Juli 2009

Salah satu bidang yang diminati adalah pasar finansial Asia yang menawarkan berbagai bentuk portofolio. Gairah investor Timur Tengah itu semakin kuat, karena prospek pasar Asia terus tumbuh dan berkesinambungan. Kini investor Arab berkeinginan menempatkan portofolio untuk Asia hingga mencapai US\$ 250 milyar atau sekitar 30% dari total investasi mereka dalam kurun lima tahun ke depan. Angka ini cukup besar, karena pada saat ini investasi portofolio negara-negara Timur Tengah yang lari Asia baru sekitar 10% dari total investasinya di seluruh dunia. ekonomi energi antara Asia dan Arab. Selama ini, hubungan ekonomi kedua kawasan diikat erat dengan ekonomi energi. Kini Asia mengonsumsi 30% dari total konsumsi minyak bumi dunia atau setara dengan 23 juta barel per hari. Melihat besarnya minat investor Timur Tengah, sejak awal pemerintah dan pengusaha Indonesia tidak tinggal diam.<sup>51</sup>

Potensi ekonomi syariah ini perlu digarap dengan sungguh-sungguh. Para pengusaha harus memperhatikan kualitas produk, efisiensi, keamanan, dan hasil yang dapat dinikmati investor. Satu hal yang masih tertinggal adalah kemampuan dari dalam negeri ketika menyerap dana investasi Timur Tengah. Kemampuan ini menyangkut keberadaan sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah yang tidak mencukupi dan perangkat hukum yang belum mampu memayungi produk-produk ekonomi syariah. Misalnya obligasi syariah atau *sukuk* (surat utang

---

<sup>51</sup> [http://www.gatra.com/2007-12-24/versi\\_cetak.php?id=110555](http://www.gatra.com/2007-12-24/versi_cetak.php?id=110555), diakses 21 Juli 2009

syariah). Tak bisa dimungkiri, minat investor Timur Tengah pada produk-produk keuangan atau *institutional finance* lebih besar daripada jenis investasi lainnya. Sebagian besar investor Arab datang ke negara tujuan investasi tanpa membawa proposal pendirian perusahaan. Mereka lebih berminat membeli surat berharga. Demikian juga dalam membangun bank-bank syariah di India dan Pakistan, banyak yang memilih menguasainya dengan cara membeli 50% lebih saham di bank tersebut.

Dalam melakukan investasi obligasi dan saham, seperti diberitakan *Bloomberg*, kebanyakan investor Timur Tengah memanfaatkan jasa penasihat keuangan yang handal. Sejumlah lembaga keuangan itu sekaligus berfungsi sebagai pengelola. Beberapa lembaga keuangan tingkat dunia itu antara lain JP Morgan, Goldman Sachs, dan Citigroup. Merekalah yang menyarankan, di sektor dan perusahaan mana saja investasi harus dilabuhkan agar membuahkan keuntungan berlipat. Model investasi itu kurang dimanfaatkan oleh badan usaha atau pengusaha Indonesia untuk menarik investor Timur Tengah. Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia. Sampai dengan tahun 2005, dana yang dapat diserap oleh Malaysia dalam bentuk produk keuangan lebih dari US\$ 4 milyar. Untuk investasi langsung dari Timur Tengah, beberapa yang sudah dijejaki sampai dengan November 2008 adalah investasi properti di Jakarta dan beberapa investasi di kawasan wisata, misalnya wisata bahari di Pulau Lombok. Perusahaan itu berasal Qatar dan Uni Emirat Arab. Melihat besarnya dana investasi dari Timur Tengah, sudah

saatnya pengusaha dan badan usaha di Indonesia menangkap peluang kerja sama dengan para milyarder Arab.<sup>52</sup>

Salah satu negara kawasan Arab yang sudah cukup lama menjalin kerjasama perdagangan dan investasi dengan Indonesia adalah Mesir. Nama Mesir sudah cukup dikenal di Indonesia dan demikian pula sebaliknya. Hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan keduanya di berbagai bidang juga telah dan sedang berlangsung cukup dinamis. Dalam kerangka bilateral, Indonesia dan Mesir telah menandatangani hampir 60 perjanjian bilateral berbentuk agreement, MoU, maupun protocol, di berbagai bidang. Meningkatnya total volume perdagangan kedua negara pada tahun 2006 mencapai US\$ 363,93 juta dengan nilai surplus US\$ 315,90 juta untuk Indonesia, meningkatnya jumlah total kunjungan wisatawan Indonesia ke Mesir mencapai lebih dari 30.000 orang pada tahun 2007, dan relatif stabilnya hubungan politik kedua negara, adalah beberapa hal yang patut diapresiasi dari berbagai pencapaian positif kerjasama kedua negara selama ini. Meskipun demikian, berbagai pencapaian tadi belum mencerminkan potensi masing-masing, dalam artian bahwa masih terbuka kesempatan untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran berbagai potensi kerjasama kedua negara yang dapat digali, khususnya dalam bidang ekonomi, investasi, perdagangan dan pariwisata.

---

52 [http://www.gatra.com/2007-12-24/versi\\_cetak.php?id=110555](http://www.gatra.com/2007-12-24/versi_cetak.php?id=110555), diakses 21 Juli 2009

Pemerintah Mesir juga memberikan perhatian yang besar bagi ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, antara lain: sumber energi (listrik, gas, minyak), akses jalan, berbagai sarana transportasi (darat, laut, udara), dan teknologi telekomunikasi dan informasi. Mesir

sama.<sup>53</sup>

yang terdaftar pada bursa saham sebesar 80,3% dari GDP pada tahun yang triyun pada tahun 2006 dan market capitalization perusahaan-perusahaan *foreign direct investment* (FDI) di Mesir yang mencapai lebih dari US\$ 6,1 kuangan dan perbankan. Reformasi tersebut telah menghasilkan tingginya meningkatkan keterbukaan, baik untuk investasi, perdagangan, pajak, perekonomian negara yang mengarah pada ekonomi pasar dan Mesir dalam hal ini, juga telah melakukan berbagai reformasi sistem diproyeksikan meningkat sekitar 7,5 % (pada tahun 2008). Pemerintah tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Mesir mencapai 7,1 % dan turut menunjang terciptanya iklim investasi dan ekonomi Mesir. Pada relatif murah dan kompetitif. Relatif stabilnya situasi sosial politik Mesir Mesir. Hal ini juga berarti terjaminnya ketersediaan tenaga kerja yang setelah Nigeria) merupakan indikasi cukup potensialnya pasar domestik (terbesar di kawasan Timur Tengah dan kedua terbesar di kawasan Afrika, Indonesia. Jumlah penduduk Mesir yang mencapai hampir 78 juta jiwa sehingga menjadi peluang yang nyata dan dapat dimanfaatkan oleh Mesir memiliki berbagai potensi yang dapat dipelajari lebih lanjut

dapat dijadikan “pintu masuk” ke negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lainnya. Hal ini terkait dengan keterlibatan Mesir pada berbagai kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan regional antara lain: Egypt - EU Partnership, COMESA (negara-negara Afrika Timur dan Selatan), AGHADIR (negara-negara Arab di kawasan Mediterania), Arab Common Market (GAFTA), FTA dengan Turki, serta FTA dengan EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia dan Swiss), serta skema Qualifying Industrial Zone (QIZ). Berbagai kesepakatan perdagangan bebas tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia melalui keberadaan investor Indonesia di Mesir. Misal melalui skema QIZ memungkinkan untuk mengekspor ke AS tanpa bea masuk jika produk (terutama tekstil dan pakaian jadi) memiliki komponen dari Israel sebesar 10,5% dan 35% dari nilai produk tersebut harus diproduksi di Mesir.

Dari berbagai potensi yang ada, sebenarnya terdapat peluang di Mesir yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak di Indonesia. Dalam bidang telekomunikasi, terbuka peluang untuk ikut memperebutkan pengembangan teknologi nirkabel (GSM, 3G, VoIP, Wi-fi, Wi-Max, ataupun CDMA), khususnya semenjak Pemerintah Mesir membuka berbagai lisensi baru operator GSM 3G. Permintaan juga akan semakin meningkat tidak hanya bagi jasa telekomunikasi, tetapi juga komponen pendukung dari mulai keypad ponsel hingga fiber optics.

Dalam bidang minyak bumi dan gas, terdapat peluang cukup besar bagi penyediaan jasa dan produk peralatan migas yang diperkirakan

mencapai lebih dari US\$ 1,5 milyar, seiring dengan meningkatnya jumlah operasi perusahaan asing. Selama kurun 2001-2007, lebih dari 150 penemuan migas di Mesir telah menarik perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi di Mesir. Peningkatan konsumsi minyak domestik Mesir juga merupakan peluang investasi yang patut diperhatikan. Selain itu, berbagai peluang juga terdapat dalam bidang petrokimia, terkait dengan semakin tingginya produksi gas Mesir, dan “ambisi” Pemerintah Mesir untuk mengekspor produk petrokimia dan memenuhi demand pasar domestik Mesir.

Dalam bidang pengembangan Teknologi Informasi (TI) di Mesir yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan lebih dari 10%, sebagai salah satu penandatanganan Perjanjian TI dalam kerangka WTO, Mesir telah menghapuskan bea masuk untuk produk-produk TI. Mesir juga mempunyai proyek Smart Village yang dirancang untuk menjadi Silicon Valley Mesir yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti Microsoft dan IBM. Semua hal tersebut memberikan peluang bagi pemasaran dan produksi produk-produk TI, baik perangkat keras maupun lunak, juga e-business.

Industri pengemasan di Mesir yang selama ini masih didominasi impor dari Eropa sebesar 90%, terutama untuk mesin pengemas, juga memberikan peluang tersendiri. Dengan semakin meningkatnya ekspor Mesir, demand baik untuk mesin maupun bahan kemasan akan semakin meningkat pula, terutama bagi sektor makanan olahan, produk medis,

tekstil, kulit dan produk kimia. Berbagai pihak di Indonesia juga dapat mencoba peluang bidang otomotif. Untuk “mengganti” kendaraan bermotor di Mesir yang sudah cukup tua dan kurang layak, Pemerintah Mesir telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan bea masuk onderdil dan aksesoris otomotif hingga 10%. Peluang dalam bidang ini adalah dalam pasar kendaraan, komponen kendaraan dan jasa perawatan. Patut dicatat pula bahwa beberapa mobil yang diproduksi di Indonesia (Avanza dan MPV) telah mulai memasuki pasar Mesir.

Bidang pariwisata juga memberikan peluang lain. Tingginya tingkat kunjungan wisman di Mesir (mencapai 10 juta wisman pada 2007), telah menimbulkan demand yang cukup tinggi bagi pengadaan peralatan dan jasa hotel dan restoran (termasuk furniture). Hal ini terkait dengan adanya insentif Pemerintah Mesir bagi pembangunan berbagai resort di wilayah-wilayah baru seperti Pantai Utara, Sinai dan kawasan Laut Merah. Dalam bidang penyediaan produk rumah tangga, pasar domestik Mesir dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup stabil, telah meningkatkan demand pertumbuhan pasar produk-produk rumah tangga mencapai 4,2% per tahun.

Dalam hal ini, terdapat peluang untuk meraih pasar produk rumah tangga ber-image khusus, seperti perawatan tubuh wanita tradisional, ataupun peralatan rumah tangga bercorak etnik, seiring dengan mulai berkembangnya jumlah kalangan menengah dan atas di Mesir. Namun demikian, masih cukup banyak masyarakat Mesir yang hidup di bawah

garis kemiskinan, sehingga kebanyakan masyarakat Mesir meskipun mengalami peningkatan daya beli, cenderung mengkonsumsi produk “massal murah meriah” seperti dari China. Selain itu, tentunya masih terbuka lebar peningkatkan berbagai ekspor produk unggulan Indonesia ke Mesir, antara lain minyak kelapa sawit, benang, ban kendaraan, biji kopi, plywood, pipa besi, tembakau, kertas, produk gelas dan produk karet. Meningkatnya perekonomian Mesir yang diiringi tingginya FDI pada sektor manufaktur dan jasa membuka peluang TKI profesional untuk bekerja di Mesir. Sektor yang terbuka bagi Indonesia antara lain perhotelan, perawat dan tenaga ahli di sektor industri seperti tekstil dan perminyakan.

## **2. Tantangan Investasi di Indonesia**

Selain peluang dan potensi yang telah disampaikan di atas, perlu pula diperhatikan berbagai tantangan yang ada. Jarak yang cukup jauh dari Indonesia dan pasar yang masih banyak belum dikenal oleh pengusaha Indonesia dan Mesir merupakan salah satu hambatan peningkatan kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan Indonesia-Mesir. Dalam hal ini, perdagangan masih menghadapi dilema. Di satu sisi, terdapat indikasi ketidakmampuan atau kurangnya kapasitas produksi Indonesia terhadap permintaan Mesir (misal kurangnya bahan baku kayu telah menghambat ekspor kertas dan furnitur). Di sisi lain, banyak kontainer kosong setelah pengiriman produk ekspor Indonesia ke Mesir karena “sedikitnya” produk yang diimpor Indonesia sebagaimana terlihat

dalam neraca perdagangan bilateral. Untuk itu, perlu kiranya terus didorong minat bisnis pengusaha Mesir untuk memanfaatkan peluang pasar Indonesia guna diversifikasi pasar selain Eropa dan Amerika Serikat.<sup>54</sup>

Selain Mesir, negara kawasan Teluk yang mendukung keinginan Indonesia untuk menarik minat investor Timur Tengah adalah Uni Emirat Arab (UEA). Komitmen tersebut diberikan Menteri Keuangan UEA yang sekaligus Ketua Kadin UEA, Obaid Humaid Al Tayer saat bertemu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian pertemuan Menkeu ASEAN di Dubai pada tanggal 8 Oktober 2008. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan UEA menyampaikan komitmennya untuk turut mendukung upaya Indonesia menarik investor Timur Tengah pada umumnya dan Uni Emirat Arab pada khususnya, baik untuk investasi langsung maupun sukuk. Dalam kunjungannya, Menkeu RI juga melakukan pertemuan empat mata dengan sejumlah investor Timur Tengah terutama dari kalangan perbankan yang mengedepankan potensi pasar sukuk di Kawasan Teluk dan investasi pada umumnya Indonesia. Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara sekaligus pasar dengan 570 juta penduduk, untuk pertama kalinya menyelenggarakan roadshow investor ke kawasan Teluk (*Gulf countries*) pada 8 Oktober 2008 di Dubai. Roadshow

---

<sup>54</sup> <http://www.indonesiacairo.org>, diakses 29 Juli 2009

bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi di kawasan dengan PDB kolektif dan total perdagangan sebesar satu miliar dolar AS.<sup>55</sup>

Berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa kontribusi negara Arab terhadap pembangunan di Indonesia cukup besar khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan data BKPM tahun 2007, investasi dari Timur Tengah di Indonesia mencapai 2,17 miliar dolar AS, yang ditanamkan pada sektor infrastruktur dan properti. Qatar Investment Authority, sebagai contoh, membentuk perusahaan patungan dengan pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur dengan modal 1 miliar dolar AS. Pada bidang properti, EMAAR dari Uni Emirat Arab membangun kawasan pariwisata internasional seluas 1.200 hektare di Lombok dengan nilai investasi 600 juta dolar AS. Kemudian dalam bidang pembangkit listrik, Konsorsium Gulf Petroleum Limited (Qatar) dan Mining Power Corporation (Bahrain) bersama dengan PT Ridlatama Energi (Indonesia) membangun pembangkit listrik di Indragiri yang berkapasitas 2x150 MW. Investasi yang diserap dari proyek ini nilainya 400 juta dolar AS. Pada bidang konstruksi, investor dari Dubai, LIMITLESS, bekerja sama dengan Bakrie Group membangun pusat pengembangan bisnis di kawasan Kuningan dengan investasi 170 juta dolar AS.

Selain menerima dana dari luar, perusahaan Indonesia sendiri berinvestasi di Timur Tengah. PT PUSRI bersama NPC International Ltd,

---

<sup>55</sup> <http://www.mediaindonesia.com>, diakses 23 Juli 2009

dan Petrochemical Industries Investment Company membangun pabrik amonia dan pupuk urea di Iran dengan nilai 700 juta dolar AS. Konsorsium Indonesia yang terdiri atas PT Petrogres, Pupuk Kaltim, Medco Energy, dan Bosowa juga membangun pabrik asam fosfat di Maroko bekerja sama dengan OCP, Maroko. Proyek itu akan menelan investasi sekitar 350 juta dolar AS. Pada bidang konstruksi, PT Waskita Karya membangun menara milik Bin Ladin Group di Dubai senilai 10 juta dolar AS. Sementara, kerja sama bidang jasa keuangan dibuktikan dengan Al Barakah Bank dari Saudi Arabia dan Asian Finance Bank dari Qatar telah resmi membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Jika dilihat secara makro, terlihat jelas bagaimana bisa memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangga dalam menarik PMA merupakan suatu tantangan besar bagi Indonesia saat ini. Tantangan terutama sangat berat untuk menarik atau mempertahankan PMA yang sudah beroperasi di Indonesia di industri-industri *footloose* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin untuk menarik PMA di sektor pertambangan, Indonesia tidak perlu terlalu khawatir, karena bagaimanapun juga suatu perusahaan asing yang sangat tergantung pada bahan baku yang hanya dimiliki oleh sejumlah kecil negara di dunia, termasuk Indonesia seperti misalnya migas, batu bara dan emas, harus beroperasi di Indonesia.

Jadi dalam hal ini persaingan yang dihadapi Indonesia relatif kecil, dibandingkan dengan persaingan dalam menarik PMA untuk industri-industri non-sumber daya alam. Dengan biaya transportasi yang

menurun terus selama ini akibat kemajuan teknologi dalam transportasi dan informasi, bukan lagi merupakan penghalang bagi sebuah perusahaan asing untuk membangun pabriknya di, misalnya Malaysia, walaupun sebagian besar produknya untuk pasar domestik di Indonesia. Apalagi jika sebuah perusahaan multinasional pada awalnya ingin membangun pabriknya di Indonesia dengan tujuan pasar ASEAN. Walaupun upah buruh paling murah di Indonesia dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya, namun jika begitu banyak permasalahan di dalam negeri sehingga pada akhirnya membuat total biaya produksi di Indonesia menjadi lebih mahal daripada misalnya di Malaysia, maka sudah dapat dipastikan si investor tersebut akan memilih Malaysia sebagai negara tujuan pertama.

Laporan dari UNCTAD (2004) menyajikan peringkat sepuluh (10) besar negara-negara penerima PMA di Asia dan Pasifik (Gambar 5). Sudah diduga, China (termasuk Hong Kong) merupakan negara penerima terbesar, yang mencerminkan daya saing investasi dari negara tersebut paling tinggi di kawasan tersebut. Banyak faktor yang membuat negara Panda tersebut sangat menarik untuk investasi, diantaranya stabilitas politik dan sosial, kebijakan ekonominya yang sangat mendukung kegiatan bisnis, kondisi tenaga kerja baik dalam keterampilan maupun keuletan bekerja yang jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia, dan kondisi infrastruktur yang baik. Di dalam kelompok ASEAN, hanya Singapura, Malaysia dan Thailand yang masuk dalam Top 10. Ini menandakan bahwa dari perspektif ASEAN, daya saing Singapura adalah yang paling tinggi

untuk menarik PMA.<sup>56</sup>

Satu hal yang sangat menarik dari gambar ini adalah bahwa China dan India yang belakangan ini sering disebut-sebut sebagai pendatang baru di dalam perdagangan regional yang sangat berpotensi menjadi dua kekuatan ekonomi global merupakan tujuan penting PMA. Jika hal ini berlangsung terus, sangat dapat dipastikan bahwa kedua negara tersebut dalam waktu singkat akan benar-benar menjadi kekuatan-kekuatan baru ekonomi global, dan ini akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekspor Indonesia ke kawasan Asia khususnya Arab atau dunia umumnya.

Lebih spesifik lagi, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kemampuannya menghilangkan semua permasalahan yang disebut di atas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Waktu sangat penting saat ini karena perubahan-perubahan global yang semakin cepat dibandingkan dengan, bilang 20 tahun yang lalu, terutama dalam 13 teknologi, sistem keuangan, pola perdagangan baik pada tingkat regional (*regionalism*) maupun pada tingkat dunia, dan selera masyarakat dunia sebagai konsekuensi dari peningkatan pendapatan dunia per kapita. Perubahan-perubahan ini membuat pola produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional berubah terus, dan ini selanjutnya mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Sebagai satu contoh konkrit, jika Indonesia tidak cepat memperbaiki kondisinya infrastrukturnya, sementara Cina dengan laju yang cepat terus membangun jalan-jalan raya, jaringan-

---

<sup>56</sup> [www.kadin.indonesia.or.id](http://www.kadin.indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

jaringan telekomunikasi, areal-areal untuk industri, dan pelabuhan-pelabuhan, maka Indonesia akan kehilangan peluang mendapatkan investasi-investasi baru dari luar.

Banyaknya permasalahan yang hingga saat ini belum tuntas seperti revisi undang-undang perburuhan dan undangt-undang investasi, serta infrastruktur yang semakin buruk kondisinya (seperti jalan Pantura) semakin mempersulit Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut di atas. Jika Indonesia tidak mampu menghadapi tantangan ini, konsekuensinya sangat besar, mulai dari hilangnya kesempatan kerja, devisa (jika perusahaan bersangkutan melakukan ekspor) dan transfer teknologi. Yang pertama tentu akan berakibat pada lambatnya penurunan kemiskinan; semakin besarnya kebutuhan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri dan tertinggalnya Indonesia dalam pembangunan sektor industri baik dari sisi kualitas maupun dari sisi daya saing.<sup>57</sup>

Persoalan investasi di Indonesia merupakan persoalan lama yang terus berulang dan tidak ada upaya yang signifikan untuk memperbaikinya. Faktor penghambat investasi, seperti kepastian berusaha, penegakan hukum, dan perburuhan, masih menjadi momok bagi investor. Selain itu, faktor keamanan dalam negeri juga mempengaruhi minat investasi. Akibatnya daya saing investasi Indonesia masih lemah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti: Malaysia dan

---

<sup>57</sup> [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id), diakses 10 November 2009

Singapura. Oleh karena itu, promosi investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono harus diiringi dengan sejumlah perbaikan iklim usaha di dalam negeri, seperti soal ketenagakerjaan, perpajakan seperti pajak ganda, keseriusan pemerintah pemberantas penyelundupan, dan pembenahan serta sinkronisasi pelaksanaan otonomi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Tanpa upaya keras pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki semua itu sulit bagi Indonesia menarik investasi asing khususnya negara kawasan Timur Tengah masuk ke Indonesia.

Banyak investor dari Timur Tengah yang masih menahan diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena belum disahkannya payung hukum seperti UU Sukuk yang banyak diminati oleh investor Timur Tengah. Bahkan dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan (*trust*) mereka terhadap Indonesia belum seperti negara-negara tetangga lain. Bila dibanding China, Malaysia, Vietnam, dan Singapura, catatan investasi Indonesia dari Timur Tengah masih jauh ketinggalan.<sup>58</sup>

Persoalan yang seringkali muncul terkait masih rendahnya investasi Timur Tengah di Indonesia adalah kesalahan persepsi di antara masyarakat Indonesia khususnya pelaku bisnis, bahwa dengan kuatnya ikatan emosional antara Indonesia dan Timteng, maka diasumsikan hubungan ekonomi, dagang, dan investasi akan mengalir begitu saja. Padahal, dalam perdagangan

---

<sup>58</sup> [http://www.gatra.com/2008-02-01/versi\\_cetak.php?id=110555](http://www.gatra.com/2008-02-01/versi_cetak.php?id=110555), diakses 19 Agustus 2009

dan investasi, hubungan emosional sering kali tidak menjadi faktor. Hal yang lebih penting adalah kenyamanan berinvestasi, baik kepastian hukum, hubungan perburuhan, maupun pelayanan pajak dan kepabeanan. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus membuat Indonesia lebih kompetitif, dalam persaingan untuk memajukan hubungan dagang dan investasi dengan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia harus menciptakan paradigma baru dalam menjalin hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah karena solidaritas keagamaan saja tidak cukup. Indonesia juga harus membangun citra yang semakin baik di kalangan masyarakat Timur Tengah sehingga pandangan masyarakat di kawasan itu terhadap Indonesia tidak dipengaruhi oleh pandangan negatif mengenai tenaga kerja Indonesia yang banyak bekerja di kawasan tersebut.<sup>59</sup>

Menilai berbagai peluang yang ada di negara-negara kawasan Timur Tengah hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan Indonesia karena berbagai kelemahan di dalam negeri sendiri. Akibatnya, Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan ini, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Filipina, dalam perdagangan maupun menjaring investasi dari Timur Tengah. Stigma buruk mengenai masyarakat Arab yang banyak terdengar di masyarakat Indonesia harus dihilangkan. Pada kenyataannya, rakyat di beberapa negara Arab kini telah jauh lebih maju daripada rakyat Indonesia, dalam hal ilmu pengetahuan maupun

---

<sup>59</sup> <http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.07.14231455&cha>, diakses 19 Agustus 2009

teknologi. Masih banyak kelemahan di dalam negeri dalam menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dibuat Pemerintah Indonesia dengan pemerintah di negara-negara Timur Tengah.

Dalam banyak hal, infrastruktur untuk mengoperasikan berbagai kerja sama itu harus dibangun terlebih dulu karena memang belum tersedia. Misalnya, kerja sama di bidang perbankan dengan beberapa negara di Timur Tengah. Hal yang lebih sulit adalah pelibatan kalangan pebisnis untuk meningkatkan kerja sama dengan para pebisnis di kawasan Timur Tengah. Meski di satu sisi pemerintah telah membuka jalan melalui penandatanganan beberapa nota kesepahaman, di sisi lain nota kesepahaman itu sangat lambat direalisasikan karena sangat minimnya kalangan pebisnis yang tertarik. Dengan demikian, perlu upaya bersama dan serentak untuk segera memanfaatkan berbagai tawaran menarik dari kawasan Timur Tengah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> <http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.07.14231455&cha>, diakses 19 Agustus 2009